PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA TINGKAT PENDIDIKAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS DI KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarajana

MUHAMMAD RAIHAN AL-GHIFARI
B1012201019

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini

Nama	: Muhammad Raihan Al-Ghifari
Nim	: B1012201019
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Pendapatan Perkapita Tingkat Pendidikan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Kalimantan Barat.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan tugas tugas akhir dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 8 Februari 2025



MUHAMMAD RAIHAN AL-GHIFARI
NIM. B1012201019

PERTANGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:
Nama : Muhammad Raihan Al-Ghifari
Nim : B1012201019
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pendapatan Perkapita Tingkat Pendidikan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Di Kalimantan Barat.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakandengan benar.

Pontianak, 8 Februari 2025



MUHAMMAD RAIHAN AL-GHIFARI
NIM. B1012201019

LEMBAR YURIDIS

PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA, TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT KEMISKINAN, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS DI KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT

Penanggung Jawab Yuridis

Muhammad Raihan Al-Ghifari
B1012201019

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 31 Juli 2025

Majelis Penguji

No.	MajelisPenguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	TandaTangan
1	Pembimbing TA	Dr. Erni Panca K, S.E., M.Si.	15/09/2025	
		NIP. 197206071998032001		
2	Ketua Penguji	Dr. Meiran Panggabean S.E., M.Si	19/09/2025	
		NIP. 196205251987031002		
3	Anggota Penguji	Muz'an Sulaiman S.E., M.M	16/09/2025	
		NIP. 196108241987031003		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 12 Agustus 2025
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc
NIP 197706152003121004

Scanned with CamScanner

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dengan ini, Pembimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa :

Nama	: Muhammad Raihan Al-Ghifari
NIM	: B1012201019
Jurusan	: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir (TA)	: Pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diuji.*

	Nama/ NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
Pembimbing Tugas Akhir	Dr. Erni Panca K, S.E., M.Si. NIP. 197206071998032001	4 Juli 2025	

Dipindai dengan CamScanner

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat-Nya penulisan Tugas Akhir yang berjudul "Analisis Pengaruh Upah Minimum, PDRB dan PMDN terhadap Penyerapan tenaga kerja Kalimantan Barat" dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan penulisan ini merupakan syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak yang membantu serta memberikan saran dan masukan. Dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas TanjungPura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Sc. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas TanjungPura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas TanjungPura Pontianak.
4. Ibu Dr. Erni Panca Kurniasih S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, saran, pemikiran, bimbingan, dan dorongan kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Meiran Panggabean S.E., M.Si. selaku dosen penguji Pertama yang juga telah memberikan perbaikan, arahan, saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir.
6. Bapak Muz'an Sulaiman, S.E., M.M selaku dosen penguji kedua yang juga telah memberikan perbaikan, arahan, saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan banyak ilmunya kepada penulis terkhusus Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas TanjungPura Pontianak.

8. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan BisnisTanjungPura Pontianak yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis serta telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa/i.
9. Keluarga penulis terutama bapak dan ibu saya tercinta telah memberi dukungan hangat secara moril, materil, doa, cinta dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada program S1 Jurusan Ilmu Ekonomki Studi dan Pembangunan Universitas TanjungPura Pontianak.
10. Teman-teman yang telah memberikan semangat dan support dalam menyelesaikan tugas akhir

Pontianak, 8 Februari 2025



MUHAMMAD RAIHAN AL-GHIFARI
NIM. B1012201019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan perkapita tingkat pendidikan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kriminalitas di Kalimantan Barat. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kalimantan Barat. Waktu penelitian 2019-2023. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan perkapita tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Kalaimantan Barat. Sedangkan variabel tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Kaliamantan Barat.

Kata Kunci: Pendapatan Perkapita,Pendidikan, Kemiskinan, Pengangguran, Kriminalitas

PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA TINGKAT PENDIDIKAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS DI KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT

RINGKASAN

Latar Belakang

Dirdjosisworo (2020) Kriminalitas adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan sehingga tidak boleh dibiarkan. Menurut Putra (2018) Kriminalitas masih menjadi ancaman terbesar bagi rasa aman manusia untuk berkehidupan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada nilai-nilai kemasyarakatan. Rasa aman juga merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri harus saling berkerja sama untuk mengurangi jumlah Kriminalitas di Indonesia.

Beberapa bentuk kejahatan yang berkaitan langsung dengan perekonomian meliputi pencurian, perampokan, dan penipuan yang merugikan masyarakat secara finansial. Misalnya, kasus pencurian hasil panen atau alat produksi di sektor pertanian dan perkebunan dapat menghambat produktivitas petani dan mengganggu rantai pasok lokal. Selain itu, tindakan kriminal seperti pemerasan dan pungutan liar dapat mengurangi minat pelaku usaha kecil untuk mengembangkan bisnisnya. Kriminalitas di Kalimantan Barat menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah kejadian kriminalitas di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sebanyak 3.470 kasus pada 2020.

Tingginya angka kriminalitas ini dapat berdampak pada perekonomian daerah, karena lingkungan yang tidak aman dapat menghambat investasi, mengurangi produktivitas masyarakat, dan memperlambat pertumbuhan sektor usaha. Di sisi lain, kesenjangan ekonomi dan terbatasnya peluang kerja juga berpotensi menjadi faktor pemicu tindakan kriminal. Oleh karena itu, menciptakan stabilitas keamanan dan memperluas kesempatan ekonomi menjadi langkah penting untuk menekan angka kriminalitas dan mempercepat kemajuan daerah.

Permasalahan

1. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di kabupaten/kota di Kalimantan Barat 2019-2023?
2. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di kabupaten/kota di Kalimantan Barat 2019-2023?
3. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di kabupaten/kota di Kalimantan Barat 2019-2023?
4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di kabupatne/kota di Kalimantan Barat 20291-2023?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat kriminalitas di kabupaten/kota di Kalimantan Barat 2019-2023.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kriminalitas di kabupaten/kota di Kalimantan Barat 2019-2023.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas di kabupaten/kota di Kalimantan Barat 2019-2023.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kriminalitas di kabupaten/kota di Kalimantan Barat 2019-2023.

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode kuantatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan juga data yang telah diolah oleh peneliti sendiri. Data yang digunakan berasal dari instansi seperti BPS Kalimantan Barat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk panel data yaitu gabungan antara time series dan cross section yang terdiri dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama 5 tahun terhitung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Hasil Penelitian

a. Berdasarkan hasil Uji t dapat diketahui bahwa probabilitas pendapatan perkapita diperoleh sebesar 0,1205, lebih besar dari nilai alpha 0,05, dengan nilai t-statistik -1,733728 . Hal ini menunjukkan bahwa H_0 gagal ditolak dan H_1 ditolak, yang artinya pendapatan perkapita secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Kalimantan Barat.
b. Berdasarkan hasil Uji t dapat diketahui bahwa probabilitas tingkat pendidikan diperoleh sebesar 0,7425, lebih besar dari nilai alpha 0,05, dengan nilai t-statistik -1,124383 . Hal ini menunjukkan bahwa H_0 gagal ditolak dan H_1 ditolak, yang artinya tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Kalimantan Barat.
c. Berdasarkan hasil Uji t dapat diketahui bahwa probabilitas tingkat kemiskinan diperoleh sebesar 0,4789, lebih besar dari nilai alpha 0,05, dengan nilai t-statistik -0,129512. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 gagal ditolak dan H_1 ditolak, yang artinya tingkat kemiskinan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Kalimantan Barat.
d. Berdasarkan hasil Uji t dapat diketahui bahwa probabilitas tingkat pengangguran diperoleh sebesar 0,0001, lebih kecil dari nilai alpha 0,05, dengan nilai t-statistik -0,282914 . Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh negatif namun signifikan terhadap kriminalitas di Kalimantan Barat.

Kesimpulan

1. Pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Kalimantan Barat. kenaikan pendapatan per kapita tidak secara otomatis menurunkan kriminalitas karena distribusi pendapatan yang tidak merata di Kalimantan Barat. Tingkat ketimpangan yang masih moderat (Gini Ratio sekitar 0,321) menyebabkan sebagian besar peningkatan pendapatan hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat atas, sementara kelompok rentan tetap menghadapi tekanan ekonomi yang dapat mendorong tindakan kriminal. Selain itu, jenis kriminalitas yang dominan di wilayah ini lebih bersifat sosial dan narkotika, yang kurang sensitif terhadap fluktuasi ekonomi makro seperti pendapatan per kapita.

2. Tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Kalimantan Barat. Tingkat pendidikan tidak menunjukkan pengaruh signifikan karena ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah di Kalimantan Barat masih cukup besar, serta lemahnya keterkaitan antara pendidikan formal dengan pembentukan karakter dan ketersediaan lapangan kerja. Pendidikan tanpa dukungan lapangan kerja dan penguatan nilai moral tidak cukup efektif untuk mengurangi perilaku kriminal.

3. Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Kalimantan Barat. penurunan tingkat kemiskinan tidak berbanding lurus dengan penurunan kriminalitas karena adanya mekanisme sosial budaya seperti solidaritas dan norma gotong royong yang mampu meredam potensi kriminalitas meski kemiskinan masih ada. Namun, peningkatan kasus kriminalitas juga banyak dipicu oleh faktor spesifik seperti konflik sosial lokal dan peningkatan kasus narkoba yang tidak berkaitan langsung dengan kondisi kemiskinan ekonomi.

4. Tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Kalimantan Barat. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin tinggi pula angka kriminalitas, karena individu yang menganggur lebih rentan terdorong untuk melakukan tindakan kriminal.

Saran

1. Pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat penegakan hukum, memperbaiki lingkungan sosial, dan meningkatkan kesadaran moral melalui pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan.

2. Perlu adanya penguatan kurikulum pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga pada pendidikan karakter, kewirausahaan, dan keterampilan hidup. Selain itu, pemerintah harus mendorong penciptaan lapangan kerja yang relevan dengan latar belakang pendidikan masyarakat.
3. Upaya pengentasan kemiskinan tetap perlu dilanjutkan, namun harus disertai dengan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan keamanan lingkungan, serta penguatan institusi sosial dan hukum agar pencegahan kriminalitas lebih efektif.

4. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kebijakan penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan kerja, serta mendorong sektor-sektor ekonomi yang padat karya untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Program inkubasi usaha kecil dan wirausaha juga perlu dikembangkan untuk mengurangi pengangguran secara mandiri.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT i
PERTANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR ii
LEMBAR YURIDIS iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR iv
UCAPAN TERIMA KASIH v
ABSTRAK vii
RINGKASAN viii
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
ABSTRACT 1
ABSTRAK 1
1. PENDAHULUAN 2
2. KAJIAN LITERATUR 10
   2.1 Kriminalitas 10
   2.2 Kemiskinan 11
   2.3 Pengangguran 12
   2.4 Pendidikan 13
   2.5 Pendapatan Perkapita 13
   2.6 Kajian Emipiris 14
   2.7 Kerangka Konseptual 17
3. METODE PENELITIAN 17
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 18
   4.1 Hasil Penelitian 18
   4.2 Pembahasan 22
5. Kesimpulan Dan Saran 25

DAFTAR PUSATAKA 27
LAMPIRAN 30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kriminalitas Yang Terjadi Di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Priode 2019-2022 3

Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat Priode 2019-2023 5

Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Priode 2019-2023 7

Tabel 1.4 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat Priode 2019-2023 8

Tabel 1.5 Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat Priode 2019-2023 9

Tabel 4.1 Hasil Model Uji Regresi 18

Tabel 4.2 Hasil Uji Regresi Berganda Dengan Fixed Effect Model 19

Tabel 4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 20

Tabel 4.4 Hasil Uji T 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.7 Kerangka Konseptual 17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Uji Chow 30
Lampiran 2 Hasil Uji Hausman.....30
Lampiran 3 Hasil Uji LM.....30
Lampiran 4 Hasil Common Effect Model (CEM) 31
Lampiran 5 Hasil Fixed Effect Model (FEM).....31
Lampiran 6 Hasil Random Effect Model (REM).....32
Lampiran 7 Data Yang Di Olah 33

PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA TINGKAT PENDIDIKAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP KRIMINALITAS DI KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT

[1] Muhammad Raihan Al-Ghifari
Universitas Tanjung Pura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of per capita income, education level, poverty rate, and unemployment rate on the crime rate in West Kalimantan. The research employs a quantitative descriptive approach and was conducted in West Kalimantan during the period 2019–2023. Panel data regression analysis was used as the primary analytical method. The findings reveal that per capita income, education level, and poverty rate do not have a statistically significant effect on the crime rate in West Kalimantan. In contrast, the unemployment rate exerts a positive and statistically significant influence on the crime rate in the province.

Keywords: *Per Capita Income, Education, Poverty, Unemployment, Crime Rate*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan perkapita tingkat pendidikan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kriminalitas di Kalimantan Barat. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kalimantan Barat. Waktu penelitian 2019-2023. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan perkapita tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Kalaimantan Barat. Sedangkan variabel tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Kaliamantan Barat.

Kata Kunci: Pendapatan Perkapita,Pendidikan, Kemiskinan, Pengangguran, Kriminalitas

[1] b1012201019@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan budaya dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan persaingan dalam berbagai hal dalam kehidupan manusia, seperti ideologi, sosial, ekonomi, seni, etika, maupun moral. Banyak perubahan yang terjadi pada nilai-nilai yang terkandung didalamnya, seperti materialisme, hedonisme dan lain sebagainya. Hal ini juga mengakibatkan perubahan nilai yang terdapat dalam kemasyarakatan. Perubahan tersebut juga berdampak pada perilaku manusia. Perubahan positif tentu saja sangat menguntungkan masyarakat, tetapi perubahan negatif dapat menyebabkan keresahan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat manusia yang berperilaku negatif, seperti melakukan tindakan Kriminalitas.

Dirdjosisworo (2020) Kriminalitas adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan sehingga tidak boleh dibiarkan. Menurut Putra (2018) Kriminalitas masih menjadi ancaman terbesar bagi rasa aman manusia untuk berkehidupan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada nilai-nilai kemasyarakatan. Rasa aman juga merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri harus saling berkerja sama untuk mengurangi jumlah Kriminalitas di Indonesia.

Beberapa bentuk kejahatan yang berkaitan langsung dengan perekonomian meliputi pencurian, perampokan, dan penipuan yang merugikan masyarakat secara finansial. Misalnya, kasus pencurian hasil panen atau alat produksi di sektor pertanian dan perkebunan dapat menghambat produktivitas petani dan mengganggu rantai pasok lokal. Selain itu, tindakan kriminal seperti pemerasan dan pungutan liar dapat mengurangi minat pelaku usaha kecil untuk mengembangkan bisnisnya.

Kriminalitas di Kalimantan Barat menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah kejadian kriminalitas di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sebanyak 3.470 kasus pada 2020. Tingginya angka kriminalitas ini dapat berdampak pada perekonomian daerah, karena lingkungan yang tidak aman dapat menghambat investasi, mengurangi produktivitas masyarakat, dan memperlambat pertumbuhan sektor usaha. Di sisi lain, kesenjangan ekonomi dan terbatasnya peluang kerja juga berpotensi menjadi faktor pemicu tindakan kriminal. Oleh karena itu, menciptakan stabilitas keamanan dan memperluas kesempatan ekonomi menjadi langkah penting untuk menekan angka kriminalitas dan mempercepat kemajuan daerah.

Tabel 1.1 Jumlah Kriminalitas Yang Terjadi Di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Priode 2019-2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kriminalitas (KASUS)			
		2019	2020	2021	2022
1	Sambas	347	291	276	283
2	Bengkayang	235	114	156	202
3	Landak	142	157	168	260
4	Mempawah	277	326	246	224
5	Sanggau	333	286	267	309
6	Ketapang	507	424	462	595
7	Sintang	218	200	163	194
8	Kapuas Hulu	108	88	63	95
9	Sekadau	64	44	87	139
10	Melawi	95	70	83	92
11	Kayong Utara	73	55	19	79
12	Kubu Raya	239	266	257	291
13	Singkawang	2303	1149	1113	259
14	Pontianak Kota	4941	1209	262	1078
TOTAL		9882	4679	3622	4100
Rata-Rata		706	334	259	293

Sumber: Polda Kaliamantan Barat 2019-2023

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 terdapat penurunan drastis jumlah Kriminalitas di beberapa daerah, seperti Polres Singkawang yang mencatat penurunan dari 2303 kasus pada 2019 menjadi 259 kasus pada 2022, serta Polresta Pontianak Kota yang menurun dari 4941 kasus pada 2019 menjadi 1078 kasus pada 2022. Namun, di beberapa wilayah lain, seperti Polres Ketapang, justru terjadi peningkatan jumlah Kriminalitas dari 507 kasus pada 2019 menjadi 595 kasus pada 2022.

Secara keseluruhan, tingkat Kriminalitas tertinggi berada di Polresta Pontianak Kota dengan rata-rata 2126 kasus per tahun selama 2019–2022, menjadikannya wilayah dengan jumlah kasus tertinggi secara konsisten. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah Kriminalitas terendah adalah Polres Sekadau, yang mencatat rata-rata 84 kasus per tahun selama periode yang sama. Penurunan signifikan: Terjadi penurunan tajam dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 53%. Stabilisasi setelah 2020, angka rata-rata cenderung lebih stabil dari 2020 hingga 2022, meskipun ada sedikit kenaikan pada tahun 2022 dibandingkan 2021.

Sementara, tingkat risiko terkena tindak Kriminalitas pada penduduk Kalbar sebesar 82 orang per 100.000 penduduk pada 2020. Tingkat risiko tertinggi berada Zi Kota Pontianak, yakni 17 orang per 100.000 penduduk. Risiko terendah ada di

Kabupaten Sekadau, yakni 2 orang per 100.000 penduduk. Kriminalitas konvensional yang sering terjadi dan dilaporkan di Kalbar selama 2020, antara lain pencurian sebanyak 982 kasus (23,72%), pencurian sepeda motor sebanyak 324 kasus (7,83%), dan penganiayaan sebanyak 316 kasus (7,63%).

Berdasarkan definisi Dirdjosisworo (2020), Kriminalitas adalah pelanggaran norma hukum yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan merugikan dan tidak dapat dibiarkan. Di Kalimantan Barat, faktor-faktor ini dapat berkaitan dengan beberapa aspek spesifik daerah tersebut, faktor Ekonomi Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan perdagangan lintas batas dengan Malaysia. Namun, ketimpangan ekonomi di daerah tersebut dapat mendorong beberapa individu untuk melakukan tindak Kriminalitas seperti pencurian, perampokan, atau penyelundupan. Keterbatasan lapangan pekerjaan, terutama di daerah pedesaan, juga dapat menjadi pemicu tindakan kriminal.

Kriminalitas atau Kejahatan pada hakekatnya timbul karena banyak faktor seperti faktor kemiskinan, pengangguran. Peningkatan jumlah kriminalitas juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan kepadatan penduduk (Purwanti dan Widyaningsih, 2019).

Todaro (2015) menyatakan bahwa semakin miskin seseorang maka akan semakin jauh jangkauannya untuk mendapat fasilitas yang dapat menyejahterakannya. Hal ini memiliki peluang lebih besar bagi yang bersangkutan untuk melakukan tindak Kriminalitas demi untuk mempertahankan hidupnya. Tren kemiskinan di Kalimantan Barat menunjukkan penurunan. Pada Juni 2024, jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 17,27 ribu jiwa, menjadi 336,08 ribu jiwa, jika dibandingkan dengan Maret 2023. Jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 356,51 ribu jiwa.

Kondisi kemiskinan di Kalimantan Barat dihitung berdasarkan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non-makanan. Garis kemiskinan total yang digunakan adalah sebesar Rp520,66 ribu per kapita per bulan, dengan rincian Rp425,77 ribu untuk kebutuhan makanan dan Rp137,52 ribu untuk kebutuhan non-makanan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut ini gambaran lengkap tingkat kemiskinan yang ada di kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat Priode 2019-2023

Kabupaten/Kota	PERSENTASE KEMISKINAN (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	8,19	7,7	7,66	6,92	7,08
Bengkayang	6,96	6,62	6,48	6,03	6,28
Landak	11,47	11,12	10,99	10,01	9,97
Mempawah	5,32	4,95	5,18	5,32	5,21
Sanggau	4,57	4,46	4,55	4,51	4,79
Ketapang	10,54	10,29	10,13	9,39	9,39
Sintang	9,65	9,27	9,28	8,57	8,18
Kapuas Hulu	9,62	8,99	8,93	8,59	8,16
Sekadau	6,11	5,87	6,26	5,85	5,85
Melawi	12,38	12,04	12,01	11,44	11,12
Kayong Utara	9,98	9,56	9,33	9,04	9,13
Kubu Raya	4,74	4,42	4,34	4,12	4,23
Kota Pontianak	4,88	4,7	4,58	4,46	4,45
Kota Singkawang	4,91	4,53	4,83	4,67	4,7
Kalimantan Barat	7,81	7,47	7,47	7,07	7,04

Sumber: Badan Statistik Kalimantan Barat

Berdasarkan Tabel 1.2, tren persentase kemiskinan di Kalimantan Barat selama tahun 2019 hingga 2023 cenderung menurun secara umum, meskipun terdapat sedikit fluktuasi di beberapa kabupaten/kota. Misalnya, Kabupaten Ketapang mengalami penurunan persentase kemiskinan dari 10,54% pada tahun 2019 menjadi 9,39% pada tahun 2023. Penurunan serupa juga terjadi di Kabupaten Landak, dari 11,47% menjadi 9,97%, serta di Kabupaten Kapuas Hulu, dari 9,62% menjadi 8,16%.

Namun, tidak semua daerah menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Di Kabupaten Sambas, meskipun sempat turun hingga 6,92% pada tahun 2022, angka kemiskinan kembali naik menjadi 7,08% pada 2023. Kabupaten Sekadau juga mengalami fluktuasi, dengan kenaikan dari 5,87% (2020) menjadi 6,26% (2021), lalu kembali turun dan stabil di 5,85% pada 2022 dan 2023.

Kota Singkawang dan Kota Pontianak secara konsisten mencatat angka kemiskinan yang rendah. Pada tahun 2023, Kota Singkawang memiliki persentase kemiskinan sebesar 4,7%, sedangkan Kota Pontianak sebesar 4,45%. Sementara itu, Kabupaten Melawi mencatat persentase kemiskinan tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 11,12%, disusul oleh Kabupaten Landak (9,97%) dan Kabupaten Ketapang (9,39%).

Secara keseluruhan, rata-rata persentase kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat menurun dari 7,81% pada tahun 2019 menjadi 7,04% pada tahun 2023, menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi di sebagian besar wilayah, meskipun tantangan masih ada di beberapa kabupaten dengan angka kemiskinan yang tetap tinggi.

Penurunan kriminalitas di kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang sejalan dengan penurunan kemiskinan menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara perbaikan kondisi ekonomi dan penurunan Kriminalitas. Namun, keberhasilan ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain, seperti penegakan hukum yang lebih baik, peningkatan pendidikan, serta peran aktif komunitas dalam menjaga keamanan. Ini menunjukkan bahwa strategi yang komprehensif dalam menangani kemiskinan dan Kriminalitas dapat menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Selain kemiskinan, tingkat pengangguran juga dianggap mempengaruhi tingkat kriminalitas di suatu daerah. Ketika banyak individu tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang memadai, mereka mungkin merasa terdesak secara ekonomi, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam tindakan ilegal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar. menurut Sukirno (2016, pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

Menurut Rahmalia (2019) tingkat pengangguran yang tinggi juga sering kali dikaitkan dengan menurunnya kualitas hidup, frustrasi sosial, serta meningkatnya ketidakstabilan emosional, yang dapat memicu tindakan-tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, atau bahkan kekerasan. Ketidak mampuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga dapat memperburuk ketimpangan sosial, yang menjadi pemicu konflik dan perilaku kriminal di lingkungan tertentu.

Menurut Bank Indonesia Kalimantan Barat Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024 berada pada angka 4,20%, membaik dibandingkan Februari 2023 sebesar 4,52%. Rasio kemiskinan mengalami perbaikan menjadi 6,71% pada Maret 2023, turun dibandingkan Maret 2022 sebesar 6,73%. Meski demikian, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 mengalami peningkatan 3,1 ribu jiwa atau 0,89% (yoy), dibandingkan Maret 2022.

Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Priode 2019-2023

Kab/Kota	Tingkat Pengangguran (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	3,48	3,71	3,97	5,08	5,04
Bengkayang	2,66	3,91	4,42	2,84	2,92
Landak	2,69	3,38	3,22	1,78	2,24
Mempawah	5,11	7,55	7,71	7,48	7,33
Sanggau	3	3,52	3,45	3,76	3,86
Ketapang	4,39	7,3	6,94	6,71	6,57
Sintang	3,1	4,5	3,95	2,97	2,92
Kapuas Hulu	2,43	4,02	4,18	2,21	2,19
Sekadau	3,04	3,39	2,92	1,33	2,29
Melawi	2,39	2,7	2,66	1,95	2,46
Kayong Utara	3,89	3,71	3,78	3,1	3,04
Kubu Raya	5,5	7,14	7,02	6,87	6,76
Kota Pontianak	9,06	12,36	12,38	9,92	8,92
Kota Singkawang	6,31	8,78	9,16	8,63	8,51
Kalimantan Barat	4,08	5,43	5,41	4,62	4,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Pada tahun 2023, Kota Pontianak mencatat tingkat pengangguran tertinggi sebesar 8,92%, diikuti oleh Kota Singkawang (8,51%) dan Mempawah (7,33%). Sebaliknya, Kapuas Hulu memiliki tingkat pengangguran terendah sebesar 2,19%, disusul oleh Landak (2,24%) dan Bengkayang (2,92%). Beberapa wilayah menunjukkan kenaikan signifikan, seperti Sambas yang meningkat dari 3,48% pada 2019 menjadi 5,04% pada 2023, Kota Singkawang dari 6,31% menjadi 8,51% pada periode yang sama, dan Mempawah dari 5,11% menjadi 7,33%.

Di sisi lain, beberapa wilayah mencatat penurunan signifikan, seperti Kota Pontianak yang turun dari puncaknya 12,38% pada 2021 menjadi 8,92% pada 2023, Kapuas Hulu dari 4,18% pada 2021 menjadi 2,19%, dan Landak dari 3,38% pada 2020 menjadi 2,24% pada 2023. erjadi lonjakan tingkat pengangguran dari 4,08% (2019) menjadi 5,43% (2020), dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Stabilitas setelah 2020 tingkat pengangguran menunjukkan sedikit penurunan dari tahun 2021 hingga 2023, meskipun rata-rata masih di atas angka 2019. 2023 angka stabil di 4,65%, sedikit lebih tinggi dibandingkan 2022 (4,62%), tetapi jauh lebih baik dibandingkan puncak pada 2020.

Peranan pendidikan sangatlah strategis dan merupakan indikator utama karena mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan bahkan dijadikan sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat seperti diperolehnya kondisi kerja yang baik, dapat meningkatkan

kesejahteraan dan penambahan pendapatan seseorang apabila mampu menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya. Karena tanpa pendidikan, masyarakat akan cenderung kesulitan dalam menghadapi masalah masa depan dunia secara global.

Lochner (2007) menyatakan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan, semakin rendah keterampilan seseorang, dengan jumlah lulusan SD dan SMP lebih banyak dibandingkan dengan lulusan SMA dan perguruan tinggi.. Dan hal ini dapat berakibat bagi mereka yang memiliki waktu luang yang banyak dijadikan sebagai peluang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Tingkat pendidikan di Kalimanta Barat terus mengalami peningkatan berikut ini adalah kondisi rata-rata tingkat pendidikan di kabupaten/kota Kalimantan Barat.

Tabel 1.4 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat Priode 2019-2023

Kab/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah %				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	6,7	6,71	6,72	6,74	6,75
Bengkayang	6,53	6,76	6,8	7	7,22
Landak	7,1	7,11	7,12	7,15	7,24
Mempawah	6,82	7,03	7,04	7,17	7,2
Sanggau	6,95	7,15	7,39	7,41	7,44
Ketapang	7,26	7,31	7,46	7,48	7,55
Sintang	6,89	7,07	7,08	7,36	7,64
Kapuas Hulu	7,47	7,52	7,53	7,59	7,82
Sekadau	6,6	6,83	6,85	7,12	7,13
Melawi	6,67	6,76	6,91	7,18	7,42
Kayong Utara	6	6,01	6,02	6,21	6,35
Kubu Raya	6,82	6,83	7	7,02	7,04
Kota Pontianak	10,14	10,17	10,43	10,44	10,45
Kota Singkawang	7,72	7,89	7,9	8,19	8,21
Kalimantan Barat	7,31	7,37	7,45	7,59	7,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Secara keseluruhan, rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan positif di hampir semua kabupaten/kota. Kota Pontianak mencatatkan angka tertinggi (10,45 tahun pada 2023), diikuti oleh Kota Singkawang (8,21 tahun). Kedua kota ini unggul, karena ketersediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik dan akses yang lebih mudah.

Di sisi lain, Kayong Utara memiliki rata-rata lama sekolah terendah (6,35 tahun pada 2023), meskipun ada sedikit peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Beberapa kabupaten lain seperti Sambas dan Melawi juga sempat mencatat angka yang lebih rendah, tetapi masih lebih baik daripada Kayong Utara.

Tren ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan akses pendidikan mulai membuahkan hasil, meskipun masih diperlukan perhatian lebih untuk daerah dengan capaian terendah agar kesenjangan pendidikan antar daerah dapat dipersempit.

Selain tingkat kemiskinan,tingkat pengangguran, tingkat pendidikan pendapatan perkapita juga memliki pengaruh yang signfiikan terhadap kriminalitas menurut Jacobson, M. (2010) bahwa peningkatan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Hal ini terjadi karena orang yang lebih sejahtera cenderung memiliki lebih sedikit motivasi untuk melakukan tindak kriminal, seperti pencurian atau perampokan, yang seringkali dipicu oleh kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi.

Tabel 1.5 Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat Priode 2019-2023

Kabupaten/Kota	PENDAPATAN PERKAPITA (RIBU RUPIAH)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	Rp38.221	Rp32.927	Rp35.153	Rp38.085	Rp40.425
Bengkayang	Rp33.955	Rp30.426	Rp32.137	Rp35.057	Rp37.281
Landak	Rp28.095	Rp27.067	Rp28.870	Rp31.314	Rp33.087
Mempawah	Rp31.594	Rp28.445	Rp29.807	Rp32.239	Rp34.254
Sanggau	Rp40.930	Rp41.161	Rp44.200	Rp47.955	Rp48.675
Ketapang	Rp53.929	Rp49.485	Rp53.555	Rp58.662	Rp59.490
Sintang	Rp35.235	Rp34.955	Rp36.947	Rp40.098	Rp42.434
Kapuas Hulu	Rp38.905	Rp40.698	Rp43.337	Rp47.056	Rp50.079
Sekadau	Rp32.155	Rp31.089	Rp33.339	Rp36.355	Rp38.714
Melawi	Rp24.790	Rp23.004	Rp24.277	Rp26.209	Rp27.743
Kayong Utara	Rp36.854	Rp33.386	Rp35.333	Rp38.140	Rp40.464
Kubu Raya	Rp50.651	Rp47.586	Rp50.546	Rp56.015	Rp59.951
Kota Pontianak	Rp60.236	Rp57.257	Rp60.540	Rp66.164	Rp70.892
Kota Singkawang	Rp46.022	Rp43.219	Rp45.668	Rp49.229	Rp52.412
Total	Rp551.572	Rp520.705	Rp553.709	Rp602.578	Rp635.901
Kalimantan Barat Rata-Rata	Rp39.398	Rp37.193	Rp39.551	Rp43.041	Rp45.422

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Rata-rata pendapatan per kapita menunjukkan tren meningkat dari tahun 2020 hingga 2023 setelah sempat turun pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19). Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023 kota Pontianak secara konsisten memiliki pendapatan per kapita tertinggi setiap tahun, dengan peningkatan yang stabil. Pada tahun 2023, pendapatan per kapita tertinggi di Kalimantan Barat tercatat di Kota Pontianak sebesar Rp70.892, yang lebih tinggi Rp25.470 dibandingkan rata-rata provinsi. Posisi kedua adalah Kubu Raya dengan pendapatan per kapita Rp59.951, lebih tinggi Rp14.529 dari rata-rata provinsi.

Sebaliknya, pendapatan per kapita terendah tercatat di Kabupaten Melawi sebesar Rp27.743, lebih rendah Rp17.679 dibandingkan rata-rata provinsi. Diikuti oleh Kabupaten Landak dengan pendapatan per kapita Rp33.087, lebih rendah

Rp12.335 dari rata-rata provinsi Tingkat Kriminalitas, kemiskinan, pengangguran, dan pendapatan per kapita di Kalimantan Barat saling terkait erat. Daerah dengan kemiskinan tinggi, seperti Ketapang (kemiskinan 53,84% pada 2023), juga menunjukkan jumlah Kriminalitas yang tinggi, seperti yang tercatat pada 2022 (595 kasus), yang mencerminkan bahwa kemiskinan dapat memicu tingginya tingkat Kriminalitas. Selain itu, daerah dengan tingkat pengangguran tinggi, seperti Ketapang dan Kota Pontianak, juga memiliki kemiskinan signifikan, yang berkontribusi pada peningkatan Kriminalitas.

Meskipun Pontianak memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah (31,46% pada 2023), dinamika Kriminalitas tetap terpengaruh oleh faktor lain seperti urbanisasi dan mobilitas tinggi. Tingkat pendidikan yang tinggi di sebagian besar wilayah, dengan angka di atas 85%, berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta menurunkan tingkat Kriminalitas.

Pengurangan pengangguran dan kemiskinan dapat meningkatkan pendapatan per kapita, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup. Sebaliknya, daerah dengan kemiskinan tinggi seperti Ketapang dan Melawi kemungkinan memiliki pendapatan perkapita yang lebih rendah, mengindikasikan pentingnya perbaikan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan pendidikan berpotensi menurunkan Kriminalitas dan meningkatkan pendapatan perkapita, yang akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: